



PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN LEMBURSITU



2026

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 30 TAHUN 2026
 TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA
 KECAMATAN LEMBURSITU KOTA
 SUKABUMI TAHUN 2026

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA
 KECAMATAN LEMBURSITU KOTA SUKABUMI TAHUN 2026

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2026 disusun berdasarkan Surat Peraturan Wali Kota Sukabumi nomor 30 Tahun 2026 tanggal 06 agustus 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026, adanya perubahan Rencana Kerja terjadi atas usulan perubahan anggaran, penambahan anggaran dan pergeseran anggaran sehingga akan berdampak pada berubahnya beberapa output indikator kinerja program /kegiatan/subkegiatan.

Kecamatan Lembursitu terletak diantara pusat pertumbuhan kawasan bisnis dan pertanian Kota Sukabumi karena sebagian wilayahnya terbentang di jalur lintasan Jakarta, jalur perbatasan kabupaten sebagai pintu gerbang sebelah selatan Kota Sukabumi. Jarak dari Kota Sukabumi 5 km, cukup dekatnya jarak membuat pergerakan pertumbuhan penduduk sangat cepat terbukti dengan berkembangnya perumahan, perkembangan pendidikan dan perekonomian. Maka diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi.

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi. Sebagai perangkat

daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Wali Kota untuk menangani urusan otonomi daerah”*.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun Untuk menjaga suatu keselarasan pembangunan dengan pemerintah Tingkat Kota maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2026, Terhadap Rencana Strategis 2025-2029 Kecamatan Lembursitu dengan RPJMD dan RKPD Tingkat Kota harus dijadikan rujukan untuk di selaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu di tahun 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam bentuk dokumen rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu mengacu Pada RKPD Tahun 2026 dan mengacu Pada Renstra Kecamatan Lembursitu tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2026 sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor xx);
 23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1); dan
 24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5).
 25. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan walikota sukabumi nomor 24 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah daerah kota Sukabumi tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Kegiatan satu tahun Camat kedepan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2026 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Lembursitu tahun 2025-2030 maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan public dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II, adanya kondisi renja yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu Tahun 2026 adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan baik penambahan, pergeseran ataupun pengurangan;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan diatasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program, kegiatan, sub kegiatan maupun realisasi. Tahun 2026 Kecamatan Lembursitu melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Seluruh kegiatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor : 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Semua program, kegiatan dan sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan namun, dalam triwulan II ini belum semuanya tercapai karena sebagian dalam pelaksanaanya belum teralisasi.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Dalam program/ kegiatan ini tidak ada yang melebihi target.
4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :
 - Dampak dari Efisiensi anggaran

- Keterbatasan anggaran

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

- Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan Memperketat pengawasan di lapangan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan tahun 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA- SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penangg ungjawa b	K e t	
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14 = 13		15=14/6 x100%		16	17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
		7.01	KECAMATAN			64.442.743.892		13.246.957.833		12.975.274.59		2.035.293.295		3.206.193.319						5.241.486.614		5.241.486.614	17	8.1		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA			43.589.710.424		8.454.225.899		8.113.780.890		1.940.133.995		2.138.129.119						4.078.263.114		4.078.263.114	19	9.4	Kecamat an Lembur Situ	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Lembursitu	Persentase Ketercapaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Lembursitu (%)	72		100		68,80													0	0			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			174.959.162		31.928.900		5.000.000		-		3.905.000						3.905.000		3.905.000	17.1	2.23		
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		5	6		0		5					5		5		16.7	0			
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	20		2	4		2		2		2				4		4		20	0		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	20		2	4		2		2		2				4		4		20	0		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	25		7	5		2		2		3				5		5		20	0		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	25		5	5		2		2		3				5		5		20	0		

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		12	12		3	3					6	6		10	0			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6	6		2	2					4	4		13.3	0			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			123.413.126		23.263.550		5.000.000	-		3.905.000				3.905.000		3.905.000	16.7	3.16		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		5	6		0	5					5			16.7	0			
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.305.000		999.550		-	-		-				-		-	20	0		
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	20		2	4		2	2					4		4		20	0		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10.607.348		999.550		-	-		-				-		-	20	0		
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	20		2	4		2	2					4		4		20	0		
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.305.000		949.700		-	-		-				-		-	20	0		
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	25		7	5		2	3					5		5		20	0		
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.305.000		999.550		-	-		-				-		-	20	0		
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	25		5	5		2	3					5		5		20	0		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.741.262		2.967.250		-	-		-				-		-	10	0		
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	60		12	12		3	3					6		6		10	0		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.282.426		1.749.750		-	-		-				-		-	13.3	0		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6	6		2	2					4		4		13.3	0		

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.369.588.460		6.674.097.598		6.649.485.837		1.607.756.646		1.834.048.282				3.441.804.928		3.441.804.928	32.5	10.3		
	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		44		43		43		43				43		43		100	0		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		5		4		1		1				2		2		10	0		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	20		2		4		1		1				2		2		10	0		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	20		2		4		1		1				2		2		10	0		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.339.469.002		6.668.477.998		6.649.485.837		1.607.756.646		1.834.048.282				3.441.804.928		3.441.804.928	100	10.3		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		44		43		43		43				43		43		100	0		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.261.440		2.499.800		-		-		-				-		-	10	0		
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		5		4		1		1				2		2		10	0		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.264.448		1.499.900		-		-		-				-		-	10	0		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	20		2		4		1		1				2		2		10	0		
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			8.593.570		1.619.900		-		-		-				-		-	10	0		
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	20		2		4		1		1				2		2		10	0		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.104.170		1.904.650		-		-		-				-		-	13.3	0		
	Tersusunnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	30		6		6		2		2				4		4		13.3	0		

	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			10.104.170		1.904.650		-	-	-				-	-	13.3	0			
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	30		6	6	2	2			4	4			13.3	0				
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			399.208.816		37.474.800		-	-	-				-	-	20	0			
		Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	220		44	44	44	0			44	44			20	0				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	250		50	50	50	0			50	50	20	0						
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			209.380.000		31.875.000		-	-	-				-	-	20	0			
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	220		44	44	44	0			44	44			20	0				
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			189.828.816		5.599.800		-	-	-				-	-	20	0			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	250		50	50	50	0			50	50			20	0				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.471.982.596		230.067.465		185.138.750		85.127.492		30.291.221			115.418.713	115.418.713	12.4	7.84		
		Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5	5	2	0			2	2			8	0				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	285		57	57	57	0		57	57		20	0						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4	4	1	1		2	2		10	0						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		24.730	12	3	4		7	7		11.7	0						
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60		3	12	3	3		6	6		10	0						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4	4	1	2		3	3		15	0						
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			58.301.950		10.981.000		5.000.000		-		1.860.000			1.860.000	1.860.000	8	3.19			
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5	5	2	0			2	2			8	0				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			371.350.000		69.606.000		62.599.400		61.002.492		-			61.002.492	61.002.492	20	16.4		

		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	285		57		57		57		0				57		57		20	0		
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			96.232.700		18.112.900		-		-		-				-		-	10	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1				2		2		10	0		
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			107.340.310		20.232.500		22.542.350		1.155.000		5.810.000			6.965.000		6.965.000		11.7	6.49		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		24.730		12		3		4				7		7		11.7	0		
7.01.01.2.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu			527.582.250		77.758.600		66.035.000		8.975.000		15.130.000			24.105.000		24.105.000		10	4.57		
		Terlaksananya Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		3		12		3		3				6		6		10	0		
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			311.175.386		33.376.465		29.962.000		13.995.000		7.491.221			21.486.221		21.486.221		15	6.9		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		4		1		2				3		3		15	0		
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.160.497.210		191.306.260		-		-		-				-		-	16.7	0		
		Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	30		0		6		6		0				6		6		20	0		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		13		5		2		3				5		5		20	0		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		2		8		2		2				4		4		10	0		
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.082.220.000		-		-		-		-				-		-	20	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	30		0		6		6		0				6		6		20	0		
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel			403.180.000		75.893.000		-		-		-				-		-	20	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		13		5		2		3				5		5		20	0		
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			675.097.210		115.413.260		-		-		-				-		-	10	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		2		8		2		2				4		4		10	0		
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.209.307.072		773.523.819		855.823.103		229.352.257		195.501.178			424.853.435		424.853.435		36.8	10.1		
		Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		140		140		35		35				70		70		117	0		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1				2		2		10	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	95		21		19		7		2				9		9		9.47	0		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100		21		20		7		4				1 1		1 1		11	0		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.671.000		3.300.000		-		-		-		-		-		117	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		140		140		35		3 5		7 0		7 0				117	0		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				471.219.476		72.662.112		34.866.275		10.190.227		6.154.54 1		16.344.7 68		16.344.768		10	3.47		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		4		4		1		1		2		2				10	0		
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.256.280.000		234.000.000		245.000.000		28.000.000		48.370.0 43		76.370.0 43		76.370.043		9.47	6.08		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	95		21		19		7		2		9		9				9.47	0		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.470.136.596		463.561.707		575.956.828		191.162.030		140.976. 594		332.138. 624		332.138.624		11	13.5		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100		21		20		7		4		1 1		1 1				11	0			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.794.062.938		513.922.407		418.333.200		17.897.600		74.383.4 38		92.281.0 38		92.281.038		8	5.14			
	Terpeliharanya barang milik daerah sesuai dengan fungsinya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	140		31		28		8		6		1 4		1 4				10	0			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30		6		6		0		0		0		0				0	0			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		4		4		0		1		1		1		1		5	0			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		4		1		0		1		1		1		1		5	0			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	55		0		11		0		1 1		1 1		1 1		1 1		20	0			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				530.812.996		99.866.200		109.187.000		17.897.600		23.871.5 00		41.769.1 00		41.769.100		10	7.87			

		Yersediarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	140		31		28		8		6			1 4		1 4		10	0		
7.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel			65.994.200		-		5.000.000		-		-			-		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	30		6		6		0		0			0		0		0	0		
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			58.089.750		10.941.000		7.346.200		-		850.000			850.000		850.000	5	1.46		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		4		4		0		1			1		1		5	0		
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.061.000.000		403.115.207		50.000.000		-		49.661.938			49.661.938		49.661.938	5	4.68		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		4		1		0		1			1		1		5	0		
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			78.165.992		-		246.800.000		-		-			-		-	20	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	55		0		11		0		1 1			1 1		1 1		20	0		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			886.464.198		1.613.356.600		1.682.140.319		9.867.400		51.019.800			60.887.200		60.887.200	4.1	6.9		Kecamatan Lembur Siau
		Meningkatnya penyeleng garaan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lemburustu (Nilai)	90		100		88.10											0	0		
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			846.464.198		1.613.356.600		1.682.140.319		9.867.400		51.019.800			60.887.200		60.887.200	8.16	7.19		
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	265		53		53		0		0			0		0		0	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1195		239		239		60		1 3 5			1 9 5		1 9 5		16.3	0		
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			384.318.635		1.385.442.350		1.347.862.000		-		-			-		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	265		53		53		0		0			0		0		0	0		
7.01.02.2.01.0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			462.145.563		227.914.250		334.278.319		9.867.400		51.019.800			60.887.200		60.887.200	16.3	13.2		

		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1195		239		239		60		135				195		195		16.3	0		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			19.175.234.266		3.026.711.434		3.088.923.750		60.589.100		974.260.000			1.034.849.100		1.034.849.100	14	5.4	Kecamatan Lembur Siau		
		Meningkatnya partisipasi LKK dalam pembangunan Kecamatan	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam pembangunan Kecamatan (%)	500	100	100	25	50					75	75				15	0				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.760.081.124		209.903.650		123.673.550		33.113.100		31.060.000			64.173.100		64.173.100	3.33	3.65			
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	265	53	0	0	0				0	0	0			0	0					
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60	12	6	3	1				4	4				6.67	0					
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			777.737.729		87.450.500		-		-		-			-	-	0	0				

		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	265		53	0	0	0	0			0	0	0	0		
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			982.343.395	122.453.150	123.673.550	33.113.100	31.060.000				64.173.100	64.173.100	6.67	6.53		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		12	6	3	1				4	4	6.67	0		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			17.415.153.142	2.816.807.784	2.965.250.200	27.476.000	943.200.000				970.676.000	970.676.000	25	5.57		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0	53	14	0				14	14	0	0		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25		8	14	0	0				0	0	0	0		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	20		23	26	0	10				10	10	50	0		
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-	-	78.850.200	27.476.000	-				27.476.000	27.476.000	0	0		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0	53	14	0				14	14	0	0		
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.394.065.832	692.220.784	600.000.000	-	-				-	-	0	0		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	25		8	14	0	0				0	0	0	0		
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			13.021.087.310	2.124.587.000	2.286.400.000	-	943.200.000				943.200.000	943.200.000	50	7.24		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	20		23	26	0	10				10	10	50	0		
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			358.802.190	67.761.400	70.429.600	7.842.800	41.144.400				48.987.200	48.987.200	12	14	Kecamatan Lembur Sui	
		Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan (%)	500		100	100	25	50				75	75	15	0		
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			358.802.190	67.761.400	70.429.600	7.842.800	41.144.400				48.987.200	48.987.200	12	13.7		

			Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	25		5		5		2		1				3		3		12	0		
	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			358.902.190		67.761.400		70.429.600		7.842.800		41.144.400				48.987.200		48.987.200	12	13.7		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	25		5		5		2		1				3		3		12	0		
	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			432.532.814		84.902.500		20.000.000		16.860.000		1.640.000				18.500.000		18.500.000	20	4.3	Kecamatan Lembeh Siau	
			Terselenggaranya fasilitas/ pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase pelaksanaan fasilitasi koordinasi/peminaan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan (%)	500		100		100		25		50				75		75		15	0		
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			432.532.814		84.902.500		20.000.000		16.860.000		1.640.000				18.500.000		18.500.000	20	4.28		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional (Orang)	2500		500		500		300		200				500		500		20	0		
	7.01.05.2.01.0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			432.532.814		84.902.500		20.000.000		16.860.000		1.640.000				18.500.000		18.500.000	20	4.28		
			Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	2500		500		500		300		200				500		500		20	0		
																					0	0		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAOPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE LO MI P O K S A S A R A N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Cikundul							691.400.000,00	556.400.000,00	556.400.000,00	-135.000.000,00							532.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							691.400.000,00	556.400.000,00	556.400.000,00	-135.000.000,00							532.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN							691.400.000,00	556.400.000,00	556.400.000,00	-135.000.000,00							532.400.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	691.400.000,00	556.400.000,00	556.400.000,00	-135.000.000,00					-		532.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	691.400.000,00	556.400.000,00	556.400.000,00	-135.000.000,00							532.400.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Cikundul	DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas / Ormas	571.400.000,00	436.400.000,00	436.400.000,00	-135.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Cikundul	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	-	-			412.400.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	J U M L A H								691.400.000,00	556.400.000,00	556.400.000,00	-135.000.000,00							532.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										K E L O M P O K S A S A R A N	PRAKIRAAN MAJU REN CAN A TAH UN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONA L	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Cipanengah							666.200.000,00	531.200.000,00	531.200.000,00	-135.000.000,00							508.600.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							666.200.000,00	531.200.000,00	531.200.000,00	-135.000.000,00							508.600.000,00	
	7.01	KECAMATAN							666.200.000,00	531.200.000,00	531.200.000,00	-135.000.000,00							508.600.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	666.200.000,00	531.200.000,00	531.200.000,00	-135.000.000,00					-		508.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	666.200.000,00	531.200.000,00	531.200.000,00	-135.000.000,00							508.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Cipanengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN LEMBURSITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas/ Ormas	6 Pokmas/ Ormas	546.200.000,00	411.200.000,00	411.200.000,00	-135.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Cipanengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			388.600.000,00	KECAMATAN LEMBURSITU
	J U M L A H								666.200.000,00	531.200.000,00	531.200.000,00	-135.000.000,00							508.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									K E L O M P O K S A S A R A N	PRAKIRAAN MAJU RE NC AN A T A H U N 202 7		PE RAN G K A T D A E R A H P E N A N G S A R A N G J A W A B	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RK PD 202 6	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL					DAERA H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.06 .0001	Kelurahan Lembursitu							1.004.600.000,00	869.600.000,00	869.600.000,00	-135.000.000,00							821.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.004.600.000,00	869.600.000,00	869.600.000,00	-135.000.000,00							821.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.004.600.000,00	869.600.000,00	869.600.000,00	-135.000.000,00							821.400.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.004.600.000,00	869.600.000,00	869.600.000,00	-135.000.000,00					-		821.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.004.600.000,00	869.600.000,00	869.600.000,00	-135.000.000,00							821.400.000,00	
	7.01.03.2.02.000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Lembursitu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.03.2.02.000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	884.600.000,00	749.600.000,00	749.600.000,00	-135.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Lembursitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			701.400.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
		J U M L A H							1.004.600.000,00	869.600.000,00	869.600.000,00	-135.000.000,00						821.400.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										K E L O M P O K S A S A R A N	PRAKIRAAN MAJU REN CAN A TAH UN 2027		PERA NOKA T DAER AH PENANGGU NG JAWA B
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.06.0005	Kelurahan Sindangsari							567.800.000,00	432.800.000,00	432.800.000,00	-135.000.000,00							288.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							567.800.000,00	432.800.000,00	432.800.000,00	-135.000.000,00							288.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN							567.800.000,00	432.800.000,00	432.800.000,00	-135.000.000,00							288.200.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan				100 Persen	100 Persen	567.800.000,00	432.800.000,00	432.800.000,00	-135.000.000,00					-		288.200.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	567.800.000,00	432.800.000,00	432.800.000,00	-135.000.000,00							288.200.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Sindangsari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	447.800.000,00	312.800.000,00	312.800.000,00	-135.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			168.200.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	J U M L A H								567.800.000,00	432.800.000,00	432.800.000,00	-135.000.000,00							288.200.000,00	

NO	KODE	URUSA N/ BIDAN G URUSA N/ PROGR AM/ KEGIAT AN/ SUB KEGIAT AN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHIR R PERI ODE REN STR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										K E L O M P O K S A S A R A N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RK PD 202 6	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.06.006	Kelurahan Situmekar							631.400.000,00	496.400.000,00	496.400.000,00	-135.000.000,00							631.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							631.400.000,00	496.400.000,00	496.400.000,00	-135.000.000,00							631.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN							631.400.000,00	496.400.000,00	496.400.000,00	-135.000.000,00							631.400.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	631.400.000,00	496.400.000,00	496.400.000,00	-135.000.000,00					-		631.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	631.400.000,00	496.400.000,00	496.400.000,00	-135.000.000,00							631.400.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Situmekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	511.400.000,00	376.400.000,00	376.400.000,00	-135.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Situmekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			511.400.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	J U M L A H								631.400.000,00	496.400.000,00	496.400.000,00	-135.000.000,00							631.400.000,00	

Tabel di atas merupakan hasil dari print out SIPD E-dalev sampai dengan triwulan II 2026, Capaian Kinerja untuk Kecamatan Lembursitu sampai dengan triwulan II ini mencapai 64,76%.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Lembursitu menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan visi/misi secara efektif dan efisien. Adapaun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- 1) Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
- 2) Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- 4) Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
- 5) Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh sistem pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lembursitu dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI 2026 (SD TW II)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Lembursitu yang baik melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi.		Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Lembursitu	Predikat	B	Penilaian Indikator ini di triwulan IV
		Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Lembursitu	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Lembursitu	Poin	68,80	Penilaian Indikator ini di triwulan IV
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan di Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	Persen	100	50
			Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	Persen	100	50
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	50

Tabel di atas menggambarkan Pencapaian Kinerja sampai dengan triwulan II, untuk tiga indicator dengan capaian 50 persen dan dua indikatornya belum ada nilainya karena penilaiannya di akhir tahun 2026.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Kantor Camat Lembursitu yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilyahan di Kecamatan Lembursitu.

Kecamatan Lembursitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran proses dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembursitu antara lain :

- a. Kualitas Sumber daya manusia yang belum memadai, dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang terdapat di Kecamatan Lembursitu.
- b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Secara topografi Kecamatan Lembursitu dengan luas $\pm 1,069,85$ Ha/m² merupakan dataran rendah, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar 352,75 Ha/m², lahan perkebunan 35,7 Ha/m² dan sisanya, merupakan tanah kering 353,042 Ha/m² lahan perkebunan 35,7 Ha/m² dan sisanya merupakan tanah kering 353,042 Ha/m²,lain-lain 327,984 Ha/m². Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karakter Kecamatan Lembursitu lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.
2. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Lembursitu cukup signifikan, namun upaya preventif harus tetap dilakukan Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.
3. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kecamatan Lembursitu akan terus dilakukan

mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

4. Inovasi di Pemerintahan

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti halnya Kecamatan Lembursitu, Dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan Surat Keterangan Lainnya yang dibutuhkan warga masyarakat. Kecamatan Lembursitu meluncurkan Program SIPINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar). Setiap Kelurahan pun memiliki inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kelurahan Cipanengah memiliki inovasi LADU MANIS (Layanan Masyarakat Tersenyum Manis), Kelurahan Cikundul memiliki inovasi Warung Sabtu Berkah dan Tabungan Barokah (Tabarok), Kelurahan Sindangsari memiliki inovasi Juma'ah Seuri (Jumat Berkah, Sindangsari Sehat, Guyub, Tertib Nan Asri), Kelurahan Situmekar memiliki inovasi Pelana Kuat (Pelayanan Perizinan Kegiatan dan/atau Usaha Terpadu).

5. Adanya Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Kepada Camat

Dengan adanya Kepwal Nomor 188.45/109.TAPEM/2019 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat yang di dalamnya terdapat 12 pelimpahan kewenangan yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Kebudayaan,

Perpusatakaan dan Kearsipan dan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada di wilayah kecamatan meliputi : potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Kota Sukabumi. Dan alangkah elok dan bijaknya, 12 (Dua Belas) pelimpahan kewenangan ini disertai juga dengan pelimpahan anggaran, karena sehebat apapun kewenangan tanpa disertai anggaran yang memadai tidak akan berdampak signifikan dalam pencapaian target-target yang dibebankan dalam pelimpahan kewenangan tersebut.

6. Pemerataan Pembangunan di Wilayah Kecamatan

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah terlebih pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Pemerataan Pembangunan di seluruh wilayah Kecamatan Lembursitu menjadi hal yang sangat urgent dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan serta menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak untuk keberlangsungan Pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal Perubahan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Rencana Program Tahun Anggaran 2026. Program dan Kegiatan yang belum termuat pada Tahun Anggaran 2025 diusulkan kembali pada Tahun anggaran 2026. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

31
TABEL 2.4

Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		Predikat SAKIP Kecamatan Lembursitu		B	Predikat	14,401,097,200	PAD		B	Predikat	15,841,206,920
		nilai SAKIP Kecamatan Lembursitu		70	Nilai	9,466,901,972			70.25	Nilai	10,413,592,169
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu		100	Persen	9,466,901,972			100	Persen	10,413,592,169
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	54,621,490	PAD		100	Persen	60,083,639
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	5	Dokumen	36,253,910			5	Dokumen	39,879,301
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2	Dokumen	2,199,450			2	Dokumen	2,419,395
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2	Dokumen	2,199,450			2	Dokumen	2,419,395
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	7	Dokumen	1,319,835			7	Dokumen	1,451,819
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	5	Dokumen	2,199,450			5	Dokumen	2,419,395

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	12	Laporan	6,599,725		12	Laporan	7,259,698
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	6	Laporan	3,849,670		6	Laporan	4,234,637
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	7,375,347,949	PAD	100	Persen	8,112,882,744
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	43	Orang/ bulan	7,367,098,554	DAU	43	Orang/ bulan	8,103,808,410
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	5	Laporan	2,749,780		5	Laporan	3,024,758
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	2	Laporan	3,299,835		2	Laporan	3,629,819
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan dan Kelurahan	2	Dokumen	2,199,780		2	Dokumen	2,419,758
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	3,299,780	PAD	100	Persen	3,629,758
7 01 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	6	Dokumen	3,299,780		6	Dokumen	3,629,758

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	70,999,780	PAD		100	Persen	78,099,758
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan dan Kelurahan	44	Paket	38,000,000			44	Paket	41,800,000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan dan Kelurahan	50	Orang	32,999,780			50	Orang	36,299,758
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100%	Persen	313,356,175	PAD		100	Persen	344,691,793
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	5	Paket	12,089,000			5	Paket	13,297,900
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	57	Paket	77,000,000			57	Paket	84,700,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	4	Paket	22,528,000			4	Paket	24,780,800
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	12	Paket	27,821,475			12	Paket	30,603,623
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan dan Kelurahan	3	Laporan	109,395,000			3	Laporan	120,334,500
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	4	Laporan	64,522,700			4	Laporan	70,974,970

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	415,417,030	PAD	100	Persen	456,958,733
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	6	Unit	204,000,000		6	Unit	224,400,000
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	5	Unit	83,600,000		5	Unit	91,960,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	2	Unit	127,817,030		2	Unit	140,598,733
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	846,749,868	PAD	100	Persen	931,424,855
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	140	Laporan	2,200,000		180	Laporan	2,420,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	4	Laporan	94,272,068		4	Laporan	103,699,275
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	19	Laporan	228,000,000		19	Laporan	250,800,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	20	Laporan	522,277,800		20	Laporan	574,505,580
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	387,109,900	PAD	100	Persen	425,820,890

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan dan Kelurahan	31	Unit	110,064,900			31	Unit	121,071,390
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	4	Unit	12,045,000			4	Unit	13,249,500
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	4	Unit	250,000,000			4	Unit	275,000,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	11	Paket	15,000,000			11	Paket	16,500,000
		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lembursitu		3.55	Indeks	-			3.55	Indeks	-
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		100	nilai	68,062,280			100	nilai	74,868,508
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelayanan publik di kecamatan		100	Persen	1,663,529,903			100	Persen	1,829,882,894
7.1.2.201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	1,663,529,903	PAD		100	Persen	1,829,882,894
7.1.2.201.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan dan Kelurahan	53	Laporan	1,564,744,788			53	Laporan	1,721,219,267
7.1.2.201.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	239	Dokumen	98,785,115			239	Dokumen	108,663,627

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				100	Persen				100	Persen	
		Percentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan		100	Persen	3,104,382,065			100	Persen	3,414,820,272
		cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja		100	Persen	3,104,382,065			100	Persen	3,414,820,272
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	3,104,382,065			100	Persen	3,414,820,272
7.1.3.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	248,082,065	PAD		100	Persen	272,890,272
7.1.3.201.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	53	Lembaga Kemasyarakatan	106,150,000			53	Lembaga Kemasyarakatan	116,765,000
7.1.3.201.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	6	Laporan	141,932,065			6	Laporan	156,125,272
7.1.3.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	100	Persen	2,856,300,000	PAD		100	Persen	3,141,930,000
7.1.3.202.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan dan Kelurahan	5	Unit	700,000,000	DAU dan PAD		5	Unit	770,000,000
7.1.3.202.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (5 Kelurahan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	2,156,300,000	DAU dan PAD		4	Pokmas / Ormas	2,371,930,000

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan		100	Persen	82,358,760		100	Persen	90,594,636
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan		100	Persen	82,358,760		100	Persen	90,594,636
7.1.4.202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100	Persen	82,358,760	PAD	100	Persen	90,594,636
7.1.4.202.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan dan Kelurahan	5	Laporan	82,358,760		5	Laporan	90,594,636
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		100	Persen	83,924,500		100	Persen	92,316,950
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan		100	persen	83,924,500		100	persen	92,316,950
7.1.5.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	Persen	83,924,500	PAD	100	Persen	92,316,950

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.1.5.201.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	500	Orang	83,924,500		500	Orang	92,316,950
JUMLAH						14,401,097,200				15,841,206,920

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SUKABUMI TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KE L O M P O K S A S A R A N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0 JURUSAN U	Kecamatan Lembur Situ							9.088.123.384,00	8.330.881.903,00	10.088.874.559,00	1.000.751.175,00							11.320.113.254,00	
	7	NON URUSAN							8.545.675.322,00	0,00	0,00	-8.545.675.322,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							542.448.062,00	8.330.881.903,00	10.088.874.559,00	9.546.426.497,00							11.320.113.254,00	
	7.01	KECAMATAN							542.448.062,00	8.330.881.903,00	10.088.874.559,00	9.546.426.497,00							11.320.113.254,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.545.675.322,00	0,00	0,00	-8.545.675.322,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	8.558.175.322,00	7.964.086.953,00	8.113.780.890,00	-444.394.432,00					-		9.011.550.340,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Kecamatan Lembursitu]	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kecamatan Lembursitu	100	58.18	100			8.558.175.322,00	7.964.086.953,00	8.113.780.890,00	-444.394.432,00						100	9.011.550.340,00	
	7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	31.980.550,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-26.980.550,00							39.879.301,00	
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.879.301,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	23.263.550,00	0,00	0,00	-23.263.550,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU

	7.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SITU	LEMBUR
	7.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SITU	LEMBUR
	7.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.967.250,00	0,00	0,00	-2.967.250,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SITU	LEMBUR
	7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.749.750,00	0,00	0,00	-1.749.750,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SITU	LEMBUR
	7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.702.981.922,00	6.794.610.900,00	6.649.485.837,00	-53.496.085,00							7.277.560.294,00		
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	6.697.362.322,00	0,00	0,00	-6.697.362.322,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SITU	LEMBUR
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	0,00	6.794.610.900,00	6.649.485.837,00	6.649.485.837,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.277.560.294,00	KECAMATAN SITU	LEMBUR
	7.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.499.800,00	0,00	0,00	-2.499.800,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN SITU	LEMBUR

	7.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.499.900,00	0,00	0,00	-1.499.900,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	1.619.900,00	0,00	0,00	-1.619.900,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALU)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.904.650,00	0,00	0,00	-1.904.650,00							0,00	
	7.01.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.904.650,00	0,00	0,00	-1.904.650,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	73.783.000,00	0,00	0,00	-73.783.000,00							0,00	
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	44 Paket	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	35.783.000,00	0,00	0,00	-35.783.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.0 6	Admi nistra si Umum Peraka nat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	299.936.800,00	157.619.750,00	185.138.750,00	-114.798.050,00							325.034.500,00	
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.990.000,00	0,00	0,00	-10.990.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	57 Paket	0,00	62.594.400,00	62.599.400,00	62.599.400,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			84.700.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				57 Paket	57 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.140.000,00	0,00	0,00	-18.140.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.233.800,00	0,00	0,00	-20.233.800,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	10.042.350,00	22.542.350,00	22.542.350,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	50.000.000,00	65.035.000,00	65.035.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.334.500,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	99.450.000,00	0,00	0,00	-99.450.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	29.983.000,00	29.962.000,00	29.962.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	81.123.000,00	0,00	0,00	-81.123.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	292.197.300,00	0,00	0,00	-292.197.300,00							0,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sukabumi, Lumbursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU

[illegible]

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	0,00	89.187.000,00	109.187.000,00	109.187.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.071.390,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	118.937.000,00	0,00	0,00	-118.937.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	12.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-7.500.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	7.346.200,00	7.346.200,00	7.346.200,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.950.000,00	0,00	0,00	-10.950.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	14.734.400,00	0,00	0,00	-14.734.400,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	246.800.000,00	246.800.000,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	174.004.912,00	73.841.600,00	1.682.140.319,00	1.508.135.407,00					-		1.830.004.382,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	174.004.912,00	73.841.600,00	1.682.140.319,00	1.508.135.407,00							1.830.004.382,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				53 Laporan	53 Laporan	64.296.262,00	0,00	1.347.862.000,00	1.283.566.738,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.721.219.267,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				239 Dokumen	239 Dokumen	109.709.650,00	73.841.600,00	334.278.319,00	224.568.669,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	-			108.785.115,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang Kelurahan				100 Persen	100 Persen	202.524.050,00	202.523.750,00	202.523.750,00	-300,00					-		282.275.272,00	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100 Persen 4 Pokmas/ Ormas	100 Persen 4 Pokmas/ Ormas	123.673.550,00	123.673.550,00	123.673.550,00	0,00							156.125.272,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	123.673.550,00	123.673.550,00	123.673.550,00	0,00	Kota Sukabumi, Lembangsitu, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			156.125.272,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100 Persen	100 Persen	78.850.500,00	78.850.200,00	78.850.200,00	-300,00							126.150.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				53 Lembaga Masyarakat K	53 Lembaga Masyarakat K	78.850.500,00	78.850.200,00	78.850.200,00	-300,00	Kota Sukabumi, Lembangsitu, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			126.150.000,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Bidang Keamanan				100 Persen	100 Persen	68.506.600,00	70.429.600,00	70.429.600,00	1.923.000,00				-			92.358.760,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penegakan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	68.506.600,00	70.429.600,00	70.429.600,00	1.923.000,00							92.358.760,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	5 Laporan	68.506.600,00	70.429.600,00	70.429.600,00	1.923.000,00	Kota Sukabumi, Lembangsitu, Semua Kell/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			92.358.760,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan				100 Persen	100 Persen	84.912.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-64.912.500,00				-			103.924.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	84.912.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-64.912.500,00							103.924.500,00	

	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	84.912.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-64.912.500,00	Kota Sukabumi, Lembursitu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			103.924.500,00	KECAMATAN LEMBUR SITU
	J U M L A H								9.088.123.384,00	8.330.881.903,00	10.088.874.559,00	1.000.751.175,00						11.320.113.254,00		

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah diperlukan anggaran yang cukup mumpuni agar setiap target bisa terwujud dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasiskan masyarakat (*community base development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* (partisipasi, transparansi dan akuntabilitas) maka diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan dapat mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2024, 2025 dan tahun 2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-

masing SKPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan , maka diperlukan instrumen pengendalian , monitoring dan evaluasi .

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, Kecamatan Lembursitu akan menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2026.
2. Kecamatan Lembursitu dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program program yang ada di Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, Kecamatan Lembursitu wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran perubahan 2026 , Kecamatan Lembursitu wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal,

bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

2. Aparatur perencana yang ada saat ini masih menjabat 3 (Tiga) peranan sekaligus sebagai pelaksana dan pelaporan penatausahaan keuangan, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Meningkatkan peran serta kepala seksi selaku PPTK, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lembursitu tahun 2026 ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang di harapkan mampu mengoptimalkan pelayanan Kecamatan Lembursitu.

Sukabumi, 07 September 2026

WALI KOTA SUKABUMI

H. AYEP ZAKI

